

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian :

**Tabel 2.1 Tinjauan Literatur**

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	The Questions of Who, What, and How in the SciencePolicy Dialogue: Experiences from the Pan - Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change	Ha Pham	Langkah perumusan <i>Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change</i> (PCF).	Penulis mengembangkan penelitian dengan menjelaskan pelaksanaan PCF.
2	Climate change Resilience in the Canadian Arctic: The Need for Collaboration in The Face of a Changing Landscape.	Seghan MacDonald dan S. Jeff Birchall.	Pentingnya kolaborasi antara pemerintah federal dengan masyarakat adat dalam penanganan perubahan iklim melalui infrastruktur dan kebijakan.	Literatur ini merujuk pada kepemimpinan dan kebijakan subnasional. sedangkan penulis meneliti kebijakan pada tingkat federal yaitu PCF.
3	Analysis of Canada's Strategic Assessment of Climate Change in Addressing	Vanesa Robledo	Membahas kemungkinan tercapai atau tidaknya target Kanada dalam Paris Agreement	literatur ini mengambil SACC ( <i>Strategic Assessment of Climate Change</i> ) sebagai objek

	Paris Agreement Goals			penelitian. Sedangkan objek penelitian penulis adalah PCF.
4	Meeting the climate change challenge: local government climate action in British Columbia, Canada	Ann Dale, John Robinson, Leslie King, Sarah Burch, Rob Newell, Alison Shaw & Francois Jost.	Kepemimpinan di berbagai tingkat pemerintahan memiliki peran penting untuk melanjutkan dan mempercepat inovasi sebagai pendorong utama adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	Terdapat perbedaan rentang waktu penelitian.
5	Advancing knowledge and increasing capacity to address climate-driven infectious diseases in Canada	C Lee-Fuller, A Magnan, S Pharand	Membahas salah satu dampak perubahan iklim yaitu Lyme Diseases yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kanada.	literatur ini hanya membahas aspek kesehatan sebagai salah satu bagian dari pilar Adaptasi dan Ketahanan iklim. Sementara penulis meneliti empat aspek yang ada pada pilar Adaptasi dan Ketahanan iklim.

Literatur pertama yang penulis gunakan dalam memahami pembentukan kebijakan *Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change* (PCF) yaitu jurnal yang berjudul *The Questions of Who, What, and How in the Science Policy Dialogue: Experiences from the Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change*. Literatur ini ditulis oleh Ha Pham (2020) yang mengkaji proses perumusan kebijakan *Pan-Canadian Framework on Clean Growth*

*and Climate Change* (PCF) sebagai bentuk komitmen Kanada dalam menjalankan Paris Agreement. Literatur ini melihat adanya *science-policy dialogue* atau komunikasi pengetahuan dan kebijakan dalam perumusan PCF yang merupakan contoh dari model komunikasi linier dimana pembuat kebijakan sebagai pengguna pengetahuan, mengajukan pertanyaan atau meminta pengetahuan. Kemudian ilmuwan, sebagai produsen pengetahuan, menjawab pertanyaan atau menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Setelah itu para pembuat kebijakan menggunakan informasi yang diberikan oleh para ilmuwan untuk mendukung proses pengambilan keputusan mereka. Selain pengetahuan yang dimiliki oleh ilmuwan, pada proses ini pula melibatkan partisipasi masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai produsen pengetahuan dengan tujuan dapat merancang intervensi adaptasi dengan basis pengetahuan yang disesuaikan dengan keadaan lokal. Masyarakat adat termasuk ke dalam kelompok rentan dari dampak iklim sebab kehidupannya yang erat dengan lingkungan. Sehingga dibutuhkan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat ataupun masyarakat lokal untuk memahami dan beradaptasi secara efektif terhadap perubahan iklim.

Pada literatur ini, peneliti hanya berfokus untuk melihat bagaimana dialog sains dan kebijakan terjadi dalam perumusan PCF dengan menggunakan model komunikasi linear tanpa menjelaskan bagaimana pemerintah Kanada dalam melaksanakan kebijakan PCF. Maka dari itu penulis akan memaparkan langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kanada dalam menjalankan kebijakan Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change (PCF) dengan berfokus pada pilar Adaptasi dan Ketahanan Iklim.

Literatur kedua yang penulis gunakan untuk mendukung pemahaman terkait keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam kebijakan iklim adalah *“Climate change resilience in the Canadian Arctic: The need for collaboration in the face of a changing landscape”*. Literatur yang ditulis oleh Seghan MacDonald dan S. Jeff Birchall (2019) ini, membahas pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan lokal dengan masyarakat dalam keberhasilan penerapan kebijakan adaptasi jangka panjang. Wilayah arktik termasuk daerah yang rentan dari perubahan iklim, sering terjadi bencana alam seperti pada wilayah British Columbia yang mengalami kebakaran hutan dan banjir yang dirasakan oleh masyarakat di sepanjang Sungai St. John yang disebabkan oleh kombinasi hujan salju lebat, pencairan musim semi yang cepat, dan curah hujan yang tinggi. Selain memicu bencana alam, perubahan iklim juga dapat merusak infrastruktur contohnya bangunan yang rusak akibat badai. Hal ini lah yang mendorong peran para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan di pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk pemeliharaan infrastruktur dan pertahanan garis pantai. Ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim akan sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam menerapkan kebijakan adaptasi jangka panjang. Kepemimpinan wilayah atau subnasional diutamakan dalam menentukan kebijakan yang tepat dalam konteks adaptasi perubahan iklim. Beberapa wilayah telah menjalankan kebijakan ini seperti The Northwest Territories yang merilis Kerangka Kerja Strategis Perubahan Iklim NWT 2030, yang menjabarkan pendekatan Territory terhadap dampak perubahan iklim dan memprioritaskan tujuan membangun ketahanan dan beradaptasi terhadap

perubahan iklim. Selain itu, Pemerintah Nunavut juga telah mengembangkan Pusat Perubahan Iklim, yang menyediakan informasi mengenai perubahan iklim dan sumber daya lokal bagi masyarakat yang terkena dampak. Saat ini telah dibentuk kebijakan pemerintah federal dalam menangani perubahan iklim yaitu *Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change* (PCF) yang dapat membantu masyarakat yang terdampak untuk mengakses pendanaan atau bantuan teknis dalam mendukung adaptasi.

Dalam literatur ini telah dijelaskan bentuk keterlibatan pemangku kepentingan dalam menanggapi isu iklim hanya pada lingkup subnasional. Maka dengan begitu penulis akan meneliti kebijakan iklim pada tingkat pemerintah federal Kanada yaitu *Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change* (PCF).

Literatur ketiga berjudul *Analysis of Canada's Strategic Assessment of Climate Change in Addressing Paris Agreement Goals*. Literatur ini ditulis oleh Vanesa Robledo (2020), yang membahas analisa peluang Kanada dalam memenuhi target NDC-nya pada Perjanjian Paris melalui *Strategic Assessment of Climate Change 2020* (SACC) atau Penilaian Strategis perubahan iklim. NDC Kanada dalam Paris Agreement memiliki target penurunan emisi sebesar 30% pada tahun 2005. Untuk mencapai tujuan tersebut Kanada membentuk SACC yang bertujuan untuk memungkinkan pertimbangan perubahan iklim yang konsisten, dapat diprediksi, efisien dan transparan di seluruh dampaknya. SACC dibentuk dibawah Impact Assessment Act (IAA) atau Undang-Undang Penilaian Dampak yang diberlakukan pada tahun 2019. Literatur ini menganalisa tanggapan dari berbagai

pihak yaitu sektor minyak dan energi, kelompok advokasi lingkungan serta kelompok adat. Hasilnya SACC mendapat banyak kritikan seperti SACC tidak merinci proyek-proyek yang mempunyai dampak khusus terhadap emisi GRK sehingga penilaian nantinya kurang efisien dan tidak tepat sasaran, SACC juga tidak memiliki pedoman khusus untuk proyek-proyek berisiko tertentu yang membahayakan tujuan iklim Kanada, perlunya pengakuan terhadap kelompok masyarakat adat sebagai “pemegang hak” dan yurisdiksi bukan sekadar pemangku kepentingan, dan peraturan atau standarisasi yang jelas tentang kredit offset atau ganti rugi atas emisi GRK. Melihat kekurangan tersebut, dalam literatur ini merekomendasikan beberapa hal yang perlu diperbaiki dari penilaian SACC yaitu Mengubah persamaan untuk mengukur intensitas GRK menjadi satuan absolut, Menerapkan kebijakan khusus mengenai proyek-proyek yang lebih berisiko berkontribusi terhadap krisis iklim, Mewajibkan pertimbangan atas estimasi GRK di hulu dan hilir untuk laporan proyek yang mempunyai jangka waktu setelah tahun 2050 dan mencantumkan secara eksplisit hukum adat, rencana pengelolaan, prinsip-prinsip, dan informasi lainnya untuk dijadikan masukan dalam kebijakan. SACC masih perlu di revisi kembali agar lebih spesifik dan strategis agar dapat memenuhi target Kanada pada Paris Agreement. Sebab emisi Kanada pada 2020 diperkirakan hampir 20% di atas target (Perspectives on Climate Change Action in Canada—A Collaborative Report from Auditors General—March 2018).

Dalam literatur ini peneliti berfokus pada peluang SACC dalam membantu Kanada untuk mencapai target NDC-nya. Terdapat perbedaan objek penelitian

dalam hal ini. Dimana penulis akan mengkaji kebijakan PCF dalam membantu Kanada untuk mencapai target NDC-nya pada Paris Agreement.

Literatur ke-empat yang penulis gunakan dalam memahami peran kepemimpinan dalam melanjutkan dan mempercepat inovasi untuk mendorong adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yaitu *Meeting the climate change challenge: local government climate action in British Columbia, Canada*.

Literatur ini ditulis oleh Ann Dale, John Robinson, Leslie King, Sarah Burch, Rob Newell, Alison Shaw & Francois Jost (2019) merupakan sebuah proyek MC3 (Meeting the climate change challenge) yang melibatkan peneliti dari Royal Roads University, University of British Columbia, dan Simon Fraser University, serta kolaborator dari sektor publik, swasta, dan nirlaba. Penelitian ini mengeksplorasi inovasi iklim di kota-kota di Kanada utamanya adalah British Columbia (BC) sebagai salah satu pemimpin pemerintah provinsi Kanada dalam aksi iklim. Pada literatur ini terdapat dua tahap penelitian yaitu Fase I (2011-2013) dan Fase II (2014-2018). Fase pertama, memiliki tujuan untuk pengembangan studi kasus rinci dalam aksi dan/atau perencanaan iklim dengan melibatkan 11 komunitas sebagai narasumber wawancara. Hasilnya terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam aksi iklim. faktor pendorongnya yaitu kepemimpinan suatu daerah, bencana alam pendorong aksi iklim lokal, akses terhadap dana melalui provinsi dan organisasi, akses terhadap keterampilan dan sumber daya melalui kemitraan, dan pengarusutamaan kebijakan iklim. faktor penghambatnya adalah keterbatasan pendanaan, kendala sumber daya manusia, siklus pergantian pemimpin akan

mempengaruhi kebijakan iklim dan kemitraan antar masyarakat dalam aksi iklim masih dianggap sebagai masalah bagi banyak pemerintah daerah.

Fase kedua, melakukan wawancara mendalam dengan 11 komunitas pada tahap awal atau fase pertama. Penelitian difokuskan pada lingkup jalur pembangunan dengan meneliti transisi pembangunan masyarakat berkelanjutan, mengidentifikasi manfaat tambahan dari adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau serta Insentif Pemerintah secara nasional dan provinsi seperti piagam aksi iklim, pemantauan penerapan GRK di masyarakat. Peneliti menggunakan 3 bentuk analisis yaitu analisis longitudinal, analisis sentimen dan analisis dekomposisi. Analisis longitudinal yang digunakan menunjukkan perubahan menunjukkan bahwa laju perubahan kelembagaan masih lambat dan skalanya terlalu kecil hanya 2 dari 11 studi kasus yang menunjukkan pengurangan emisi GRK dalam operasi perusahaan kota mereka. Analisis sentiment menilai bahwa pemerintah daerah dan pemangku kepentingan mendukung aksi iklim dan perubahan transformatif, namun merasa frustrasi dengan lambatnya perubahan yang mereka lihat. Analisis dekomposisi menunjukkan faktor yang memengaruhi emisi sebuah daerah contohnya di wilayah Metro Vancouver faktor yang mempengaruhi emisi di wilayah ini adalah populasi dan distribusi populasi, intensitas berkendara dan jenis kendaraan. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi kebijakan pemerintah setempat untuk meminimalisir GRK. Melalui ketiga analisa tersebut terlihat bahwa tindakan iklim perlu diambil untuk mencapai berbagai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Manfaatnya dari tindakan iklim untuk adaptasi dan mitigasi adalah menciptakan kualitas air lebih baik, terjaganya



keanekaragaman hayati, terciptanya kesehatan masyarakat dan keadilan sosial. Dengan begitu literatur ini menegaskan bahwa kepemimpinan pada tiap tingkatan baik federal, provinsi atau daerah sangat mempengaruhi aksi iklim, pembangunan berkelanjutan, pembentukan kebijakan dan insentif yang dapat mempercepat penerapan inovasi iklim. Sebab potensi terbesar untuk mempercepat pergeseran jalur pembangunan saat ini terjadi ketika semua tingkat pemerintahan bekerja secara selaras satu sama lain.

Dalam literatur ini peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui aksi atau perencanaan iklim dan transisi pembangunan masyarakat berkelanjutan dengan rentang waktu 2012-2018. Maka dengan begitu penulis akan melakukan pembaharuan terkait aksi atau perencanaan iklim dan pembangunan masyarakat berkelanjutan di bawah kebijakan PCF dengan rentang waktu 2017-2020.

Literatur terakhir yang penulis gunakan untuk mendalami dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh masyarakat Kanada adalah *Advancing knowledge and increasing capacity to address climate-driven infectious diseases in Canada*. Literatur ini ditulis oleh C Lee-Fuller , A Magnan dan S Pharand (2018) ini, menjelaskan bahwa perubahan iklim juga berdampak pada kesehatan manusia dengan munculnya berbagai macam penyakit akibat cuaca yang tidak menentu salah satunya adalah penyakit Lyme yang dapat menular. Kelompok rentan memiliki risiko akan terkena dampak paling berat akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, dalam kebijakan Pan-Canadian Framework and Climate Change (PCF) pemerintah memasukan aspek kesehatan dan kesejahteraan manusia ke dalam pilar adaptasi dan ketahanan iklim. *Public Health Agency of Canada (PHAC)* atau badan

kesehatan Kanada membentuk program *Infectious Disease and Climate Change* (IDCC) untuk mewujudkan komitmennya dalam PCF. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas PHAC dalam merespon peningkatan penyakit menular akibat perubahan iklim, Memberikan akses terhadap informasi yang tepat waktu dan akurat agar warga lebih memahami risiko dari perubahan iklim dan mengambil tindakan untuk mencegah infeksi atau penularan, dan turut meningkatkan kemampuan beradaptasi atau ketahanan terhadap dampak kesehatan dari penyakit menular melalui pengawasan dan pemantauan. PHAC juga menyediakan pendanaan untuk dua bidang yaitu pemantauan atau pengawasan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Contohnya proyek peningkatan pengetahuan dasar melalui pengawasan lapangan terhadap populasi kutu, studi risiko penyakit menular di wilayah tertentu di Kanada dan pengembangan alat, pelatihan, dan sumber daya baru bagi para profesional kesehatan, populasi rentan, dan komunitas. Hal ini juga yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian, namun penulis akan memperluas upaya yang dilakukan oleh PCF pada pilar adaptasi dan ketahanan iklim tidak hanya pada aspek kesehatan dan kesejahteraan manusia namun juga meninjau bidang lain yaitu menerjemahkan informasi ilmiah dan pengetahuan tradisional ke dalam tindakan, membangun ketahanan iklim melalui infrastruktur, mendukung daerah-daerah yang rentan, dan mengurangi bahaya dan risiko bencana terkait iklim.

Fokus peneliti dalam literatur ini adalah upaya dalam mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan manusia sebagai salah satu bagian dari pilar adaptasi dan ketahanan iklim. Pembaharuan cakupan penelitian penulis lakukan dengan

meneliti pilar adaptasi dan ketahanan iklim tidak hanya pada aspek kesehatan saja, namun termasuk pada 3 aspek lainnya yaitu menerjemahkan informasi ilmiah dan pengetahuan tradisional ke dalam tindakan, membangun ketahanan iklim melalui infrastruktur, mendukung daerah-daerah yang rentan, dan mengurangi bahaya dan risiko bencana terkait iklim.

## **2.2.Kerangka Teoritis/Konseptual**

### **2.2.1.Teori Rezim Internasional**

Paris Agreement sebagai rezim lingkungan dapat dijelaskan dengan teori rezim internasional. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Stephen D. Krasner dalam mendefinisikan rezim yaitu :

*“a sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actors' expectations converge in a given area of international relations.”*(Krasner, 1982)

Krasner menyebutkan sebuah rezim internasional terdiri atas seperangkat prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan. Prinsip diartikan sebagai keyakinan terhadap kebenaran ataupun fakta dan sebab-akibat. Norma merupakan standar perilaku yang didefinisikan dalam bentuk hak serta kewajiban. Aturan sebagai bentuk pelarangan untuk bertindak. Prosedur pengambilan keputusan adalah praktik yang berlaku untuk membuat dan melaksanakan pilihan kolektif (Krasner, 1982, pp. 186). Keempat aspek tersebut wajib dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh negara yang terlibat dan menyepakati rezim. Oleh karena itu rezim memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku negara. Menurut Krasner rezim memiliki peran sebagai variabel intervening yang dapat

memengaruhi hubungan antara faktor-faktor kausal dasar dan perilaku negara-negara dalam sistem internasional. Negara yang telah menyepakati baik melalui ratifikasi ataupun aksesinya perlu mengadaptasi nilai-nilai yang terkandung dalam rezim ke dalam kebijakan nasionalnya.

Dalam buku “*Analyzing International Environmental Regimes*” karya Oran R. Young, Helmut Breitmeier, Michael Zürn menyebutkan bahwa rezim internasional merupakan institusi sosial yang diciptakan untuk menanggapi permintaan akan tata kelola yang berkaitan dengan isu-isu spesifik yang muncul dalam lingkungan sosial yang anarki (Breitmeier, 2006). Dapat dikatakan rezim sebagai hasil dari kerjasama antar negara untuk menangani masalah secara kolektif.

Paris Agreement merupakan rezim internasional yang dibentuk melalui negosiasi dan kerjasama negara-negara sebagai upaya untuk menangani permasalahan iklim. Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Krasner, Paris Agreement memiliki aturan, prinsip dan norma yang perlu dijalankan oleh negara yang meratifikasinya. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Paris Agreement, Kanada melalui kebijakan *Pan-Canadian Framework Clean Growth and Climate Change* menerapkan nilai-nilai dalam Paris Agreement ke dalam kebijakan nasionalnya untuk mencapai target NDC.

### **2.2.2. Teori Politik Hijau (*Green Politic*)**

Teori politik hijau atau *green politic* merupakan cabang ilmu politik yang mempelajari kekhususan politik lingkungan hidup dalam lanskap politik modern (Luc Semal, 2015). Teori ini menghubungkan antara politik dengan konsep lingkungan hidup, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan ekologi yang

tidak hanya berpusat pada manusia. Menurut Robyn Eckersley ekosentrisme menjadi bagian dari karakteristik teori politik hijau sebagai bentuk penolakan terhadap pandangan antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai nilai moral dan nilai independen pada ekosistem dan makhluk hidup selain manusia (Eckersley, 2007). Manusia sebagai bagian dari alam semestinya dapat memberikan dampak melalui perilaku politiknya. Termasuk dalam membuat kebijakan yang mempertimbangkan aspek lingkungan sehingga manusia tidak hanya dinilai sebagai makhluk rasional tetapi juga sebagai *natural beings* (bagian dari ekosistem/alam).

Selain Eckersley, Andrew Dobson juga menolak antroposentrisme. Dobson membagi politik hijau kedalam dua karakteristik yaitu penolakan terhadap antroposentrisme dan perlunya batasan pertumbuhan yang berorientasi pada ekonomi sebagai pemicu krisis lingkungan (Dobson, 2007). Pertumbuhan ekonomi yang tak terkendali dapat memberi dampak negatif terhadap alam seperti krisis lingkungan dan perubahan iklim. Sehingga Dobson menekankan pembatasan pertumbuhan dan turut mengutamakan peran lingkungan sebagai faktor penting dalam kehidupan sosial dan politik.

Menurut Douglas Torgerson kemunculan teori politik hijau mengusulkan agar manusia dapat menyesuaikan diri dengan tatanan alam (Torgerson, 2009). Pada dasarnya tujuan dari teori politik hijau adalah mengembalikan keselarasan antara manusia dan alam. Pada abad ke-21 ini, negara mulai menyadari pentingnya aspek lingkungan sebagai instrumen penunjang kehidupan manusia. Perubahan iklim yang terjadi menyadarkan negara untuk mengambil langkah dalam

menanggulangi permasalahan tersebut melalui kebijakan nasional. Pengendalian terhadap aktivitas ekonomi yang berdampak pada lingkungan, upaya adaptasi dan mitigasi menjadi bentuk komitmen negara untuk menjalankan pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan Kanada melalui *Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change* menjadi upaya untuk mengendalikan kegiatan ekonomi yang berpotensi memperparah dampak lingkungan seperti perubahan iklim dan berupaya menciptakan keseimbangan lingkungan dan manusia melalui pilar adaptasi dan ketahanan iklim.

### **2.2.3. Konsep Perubahan Iklim**

Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca jangka panjang dalam skala global (Setiani, 2020). Perubahan iklim menjadi fenomena global karena dampaknya yang multisektoral dan mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia dan kondisi lingkungan. Perubahan iklim dapat memicu kekeringan, kebakaran hutan dan cuaca ekstrim.

James Hansen menyebutkan perubahan iklim dipicu oleh kegiatan aktivitas manusia yang meningkatkan Gas Rumah Kaca (GRK) akibat faktor gas metana (CH<sub>4</sub>) dan nitrous oksida (N<sub>2</sub>O) (Hansen, 2007). GRK menjadi pemicu perubahan iklim yang paling besar. GRK dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan industri yang menghasilkan polusi udara.

Badan ilmiah antar pemerintah IPCC mengamati fenomena perubahan iklim sebagai perubahan dalam statistik iklim dengan rentang periode yang lama atau panjang, biasanya beberapa dekade bahkan lebih. Dampak perubahan iklim cukup beragam diberbagai wilayah yang dipicu oleh tingkat pemanasan seperti di wilayah

pesisir yang mengalami kenaikan permukaan laut, di wilayah laut Arktik mengalami pencairan lapisan es dan di wilayah laut mengalami gelombang panas laut. (IPCC, 2021)

Secara umum perubahan iklim dipahami sebagai fenomena berubahnya pola cuaca yang mempengaruhi suhu dan pola hujan dalam jangka panjang pada skala global yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang memicu peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK). Perubahan iklim menjadi tantangan global sehingga dalam penyelesaiannya dibutuhkan kerjasama antar negara dalam mengatasi faktor-faktor penyebab perubahan iklim seperti melalui Paris Agreement dan melakukan mitigasi serta adaptasi atas dampak perubahan iklim.

### **2.3. Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian merupakan prasangka atau dugaan yang dianggap sebagai kebenaran oleh peneliti sehingga asumsi ini menjadi landasan berpikir untuk menentukan arah penelitian. Asumsi menjadi bentuk prediksi peneliti terhadap hasil dari penelitian dan membantu peneliti dalam menentukan metode analisis yang sesuai. Asumsi akan diuji dan diteliti untuk membuktikan kebenarannya dengan menggunakan data. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penulis merumuskan asumsi penelitian sebagai berikut :

**“Dengan adanya kebijakan *Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change (PCF)* ini Kanada telah berkontribusi dalam mendukung implementasi Paris Agreement melalui aksi adaptasi dan ketahanan iklim”**

## 2.4. Kerangka Analisis

